

Kekuatan Normatif Diplomasi Lingkungan Uni Eropa Dalam Conference of the Parties (COP) 26

Yosua Saut Marulitua Gultom¹, Steven Montesquieu Manurung², Muhammad David Ferdian Hutauruk³,
Muhammad Farid Gibran⁴, Aliffa Augustin⁵

¹²³⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta Selatan, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta Selatan, Indonesia

Abstract

In 1992, the United Nations convened the world's largest and most important climate-related conference, the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. During the event, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was adopted. Through the UNFCCC, countries agree to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere to prevent harmful interference from human activities in the climate system. The treaty now has 197 signatures. Since 1994, the United Nations has brought together almost every country in the world to attend the World Climate Summit (Conference of the Parties (COP)) which is usually held every year. This scientific article raises the commitment of the European Union (EU) in implementing COP 26 through environmental diplomacy analysis. This scientific article aims to identify and analyze the European Union's commitment to cooperation in COP 26 in dealing with all environmental problems. Scientific articles use qualitative research methods based on literature studies. The result of this scientific article is that the European Union conducts environmental diplomacy through COP 26 by carrying out the discussions in COP 26. The conclusion of this scientific article is that COP 26 has several objectives that must be carried out by the countries involved, including the EU.

Keywords: European Union's Commitment; Environmental Diplomacy; Normative Power, COP 26

Abstrak

Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan konferensi terkait iklim terbesar dan terpenting di dunia ialah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Selama acara tersebut, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) diadopsi. Melalui UNFCCC, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah gangguan berbahaya dari aktivitas manusia di dalam sistem iklim. Perjanjian itu sekarang memiliki 197 tanda tangan. Sejak tahun 1994, PBB mempertemukan hampir setiap negara di dunia untuk menghadiri KTT Iklim Dunia (Conference of the Parties (COP)) yang biasa dilakukan di setiap tahunnya. Artikel ilmiah ini mengangkat komitmen Uni Eropa (UE) dalam melaksanakan COP 26 melalui analisis diplomasi lingkungan. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komitmen kerjasama Uni Eropa di dalam COP 26 di dalam penanganan perubahan iklim. Artikel ilmiah memakai metode penelitian kualitatif berdasarkan studi literatur. Hasil dari artikel ilmiah ini ialah Uni Eropa mengadakan diplomasi lingkungan melalui COP 26 dengan menjalankan bahasan-bahasan di dalam COP 26. Kesimpulan dari artikel ilmiah ini ialah COP 26 memiliki beberapa tujuan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang terlibat, termasuk UE.

Kata kunci: Komitmen Uni Eropa; Diplomasi Lingkungan, Kekuatan Normatif, COP 26

1. PENDAHULUAN

Beberapa dekade yang lalu, PBB menyelenggarakan konferensi global yang membahas permasalahan iklim, yakni KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dalam konferensi tersebut, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)) diadopsi. Melalui mekanisme UNFCCC, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah gangguan berbahaya dari aktivitas manusia terhadap iklim global. Perjanjian itu saat ini . Sejak tahun 1994, PBB mempertemukan hampir setiap negara di dunia untuk menghadiri KTT Iklim Dunia (*Conference of the Parties* (COP)) yang biasa dilakukan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, direncanakan pengembangan bahwa COP akan menjadi COP 27. Namun, pandemi Covid-19 telah menunda pelaksanaannya (UNFCCC 2022) sehingga COP 27 dilaksanakan pada akhir tahun 2022 yang lalu.

Uni Eropa, sebagai satu-satunya institusi supranasional di kawasan Eropa, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan komitmen terkait perubahan iklim, terutama dalam konteks Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim seperti UNFCCC dan COP. Keanggotaan Uni Eropa dalam UNFCCC memberikan landasan hukum yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam perundingan global dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan diplomasi lingkungan yang cermat dan konsisten, Uni Eropa berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk kesepakatan lingkungan global. Konsistensi dan peranannya dalam diplomasi lingkungan mencerminkan tekad Uni Eropa untuk menjadi pionir dalam mempromosikan kebijakan iklim yang ambisius dan berkelanjutan.

Uni Eropa, yang merupakan organisasi supranasional, memiliki keunggulan dalam menyatukan kebijakan dan sumber daya negara-negara anggotanya untuk menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Dalam COP26, Uni Eropa tidak hanya menyampaikan komitmen sendiri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga memainkan peran penting dalam merancang kesepakatan bersama dengan negara-negara lain. Dengan koordinasi yang efektif antaranggota dan pendekatan bersatu, Uni Eropa mendemonstrasikan bahwa sebagai institusi supranasional, mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan yang kuat dalam mengatasi masalah global bersama-sama. Keberhasilan diplomasi lingkungan Uni Eropa dalam beberapa kesepakatan global, seperti *Paris Agreement*, mencerminkan komitmen yang berkelanjutan untuk menjadi pemimpin dalam upaya global untuk melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

Pembahasan di dalam tulisan ini didasari dengan beberapa studi terdahulu, salah satunya mengenai komitmen Uni Eropa di dalam perubahan iklim via diplomasi lingkungan (*environmental diplomacy*). Hal ini mendefinisikan diplomasi lingkungan dan menelusuri kembali perkembangannya di kancah internasional (Orsini 2020). Di dalam tulisan ini, penulis bertujuan menggali secara lengkap terkait dengan diplomasi lingkungan yang dilakukan Uni Eropa dan kaitannya dengan komitmen Uni Eropa di dalam COP. Maka dari itu, penulis merumuskan pertanyaan “Bagaimana pengaruh kekuatan normatif Uni Eropa dalam diplomasi lingkungannya terhadap Conference of the Parties?”. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komitmen kerja sama Uni Eropa di dalam penanganan perubahan iklim.

2. KERANGKA ANALISIS

a. Diplomasi Lingkungan

Diplomasi lingkungan, secara praktik, telah dilakukan di Eropa sejak abad ke-14 antara Inggris dan Prancis serta Inggris dan Portugal untuk mengelola sumber perikanan dan pada abad ke-19 antara Amerika Serikat dan Kanada terkait pengelolaan sumber air (Orsini, 2020). Penggunaan istilah dan gagasan terkait diplomasi yang berhubungan dengan lingkungan telah diajukan dalam United Nations Conference of Human Environment tahun 1972 di Stockholm. Secara resmi, istilah diplomasi lingkungan tersebut digunakan dalam United Nations Environment

Programme (UNEP) pada tahun 1973 sebagai hasil dari konferensi sebelumnya. Makna yang lebih luas dan lebih dipopulerkan pada Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro. Ali dan Vladich (Jaminola, 2021) berpendapat bahwa karena kebaruan dari istilah diplomasi lingkungan dalam lingkungan akademik, terdapat perdebatan multidisiplin mengenai pendefinisian. Penulis disini akan memfokuskan pada definisi yang digunakan dalam konteks keserjanaan Ilmu Hubungan Internasional sehingga fokus yang akan dibawakan adalah diplomasi dalam kerangka negosiasi kerja sama antarpemerintah dalam tata kelola lingkungan dunia, termasuk kaitannya dengan kerja sama yang dilakukan *International Governmental Organization* (IGO). Meskipun demikian, dalam kajian ini tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak privat, seperti Non-Governmental Organization (NGO) atau sektor pebisnis sepanjang diplomasi yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai IGO.

Menurut Vollenweider, negara-negara melihat perjanjian lingkungan internasional sebagai alat yang efisien untuk meningkatkan kondisi lingkungan. Diplomasi lingkungan yang menghasilkan kesepakatan internasional dapat mengubah perhitungan *cost-benefit* melalui penyediaan informasi penting mengenai ongkos degradasi lingkungan (Tayebi et al 2017; Maamoun 2019). Namun, dampak pasti dari perjanjian lingkungan internasional belum dapat disimpulkan karena kesulitan yang terkait dengan penilaian dampaknya. Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan bahwa perjanjian lingkungan internasional pada negara industri besar, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak menimbulkan efek positif terhadap lingkungan dan justru meningkatkan emisi CO₂ (Khan dan Hou 2021; Li, Zakari, dan Tawiah 2020). Kellenberg dan Levinson (Jaminola 2021) menunjukkan dua tantangan dalam menguji secara empiris dampak kesepakatan lingkungan, yaitu masalah dalam memperkirakan hasil kontrafaktual dan tidak tersedianya atau terbatasnya data indikator sebelum pelaksanaan kesepakatan. Nicolas dan Kallab (2021) juga menunjukkan tantangan-tantangan pada tingkat internasional, yakni kurangnya visi bersama di antara pemangku kepentingan yang berbeda, kurangnya koordinasi antar organisasi lingkungan, perjanjian internasional yang kurang memenuhi kebutuhan lingkungan, kurangnya kemampuan penegakan, dan pendanaan yang tidak berkelanjutan. Meskipun terdapat pertentangan pendapat terhadap dampak dari perjanjian internasional, sepemikiran dengan Banshchikova (2021) bahwa perlu untuk memenuhi celah dalam anarkisme internasional untuk dapat menciptakan tata kelola dunia dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena secara historis, upaya diplomasi lingkungan mampu memengaruhi perilaku negara.

b. Uni Eropa Sebagai Kekuatan Normatif

Konsep kekuatan normatif telah secara signifikan mempengaruhi diskusi tentang peran Uni Eropa dalam Politik Internasional, khususnya ketika Ian Manners (2002) memperkenalkan hal tersebut. Manners berpendapat bahwa hal tersebut mewakili jenis kekuasaan baru, yang mengejar tujuan normatif (berlawanan dengan keuntungan material yang mementingkan diri sendiri) melalui cara-cara yang sebagian besar bersifat normatif (berlawanan dengan cara-cara yang secara dominan bersifat militer dan ekonomi). Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kekuatan UE terletak pada norma-norma yang dikemukakan oleh Uni Eropa sendiri, dan oleh karena itu, Uni Eropa akan dapat 'membentuk konsepsi tentang "normal"'.

Daripada mengikuti aturan tradisional, Uni Eropa mengubah aturan-aturan ini dan menetapkan standar baru dalam politik internasional yang dibangun atas norma-norma universal tentang hak asasi manusia, supremasi hukum, perdamaian, hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam mengejar norma-norma ini, menurut Manners, Uni Eropa tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi atau geopolitik, tetapi juga penetapan standar demi dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, Uni Eropa akan mengejar norma-norma ini meskipun tidak ada keuntungan material yang jelas, yang tentu saja tidak mengecualikan kemungkinan bahwa norma-norma tersebut akan tetap bermanfaat bagi keuntungan ekonomi Uni Eropa.

Salah satu klaim utama Manners adalah bahwa Uni Eropa menggunakan kekuatan normatif ini tidak hanya sebagai aktor, tetapi juga melalui keberadaannya yang nyata dan penanamannya dalam struktur masyarakat internasional. Oleh karena itu, ia memperlakukan perdebatan yang ada tentang keaktoran Uni Eropa dan berargumen bahwa Uni Eropa dapat menjadi sebuah kekuatan bahkan tanpa berkembang sebagai aktor yang sepenuhnya. Hal ini dilakukan secara solidaris oleh setiap anggota Uni Eropa itu sendiri (Diez, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber pustaka, atau biasa disebut studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengambilan data berdasarkan bacaan-bacaan atau penelitian-penelitian terdahulu yang berelevansi dengan topik pembahasan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara untuk pengolahan data, setelah dilakukan pengumpulan data, data diolah dengan metode analisis deskriptif. Penulis dalam hal ini mencari data-data, baik itu *online* maupun dari sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, dan laporan resmi untuk menganalisis secara deskriptif terkait Uni Eropa dalam menjalankan diplomasi lingkungannya dan mengenai pengaruh Uni Eropa secara normatif untuk mampu mempengaruhi kesepakatan global. Fokus data yang digunakan adalah keterlibatan Uni Eropa dalam COP dengan data-data lain yang dinilai relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uni Eropa di Dalam *Conference of the Parties*

Uni Eropa (UE), salah satu organisasi internasional terbesar di dunia, melalui kesepakatan komunal yang melibatkan hampir 200 persetujuan negara pada KTT Iklim (COP 26) tahun 2021 silam di Glasgow, Skotlandia, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar-komitmen negara dan mengurangi emisi yang lebih ketat untuk menghentikan suhu global warming di atas 1,50C di atas tingkat praindustri. Terkait hal ini, diplomat paling senior dalam mengurus permasalahan iklim adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrel. Josep Borrel bekerja sama dengan komisi dan negara-negara anggota UE yang diminta untuk meningkatkan diplomasi iklim yang ada dan menetapkan target yang lebih ambisius. Untuk mengurangi emisi, tercipta kebijakan baru yang dirundingkan oleh negara-negara UE dan Parlemen Eropa, seperti dibuatnya tarif perbatasan karbon pertama di dunia dengan membedakan tarif emisi barang berpolusi yang diimpor ke Uni Eropa yang mana ketentuan ini menimbulkan gejolak internasional dan mengejutkan bagi beberapa negara besar, seperti Rusia dan Cina.

COP 26 merupakan konferensi yang menjadi bagian dari kerangka UNFCCC yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, pada 31 Oktober–13 November 2021. Dalam hal ini, COP 26 itu penting untuk memperbarui dan menegaskan kembali komitmen Paris Agreement untuk membatasi global warming di bawah 20C dan menetapkan target yang lebih matang, sehingga diperlukannya integrasi bersama antarpemerintah negara-negara, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang sangat merugikan bagi seluruh aspek kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Uni Eropa yang seharusnya mengayomi para negara anggotanya, memiliki peran penting dalam menangani permasalahan lingkungan, terutama iklim yang kini semakin diperparah seiring berjalannya waktu. Terdapat berbagai isu kunci dalam COP 26, yakni pembagian peran yang adil, ambisi iklim, pembiayaan iklim, kerugian dan kerusakan iklim, pasar karbon, dan penggunaan serta produksi batu bara. Pada akhirnya timbul hasil dari negosiasi COP 26 yang disebut Pakta Iklim Glasgow yang berisikan kesepakatan untuk meninjau kembali rencana pengurangan emisi, komitmen untuk membatasi penggunaan batu bara, dan komitmen pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang.

Uni Eropa, sebagai pilar segala penyelesaian aspek permasalahan di dunia, ikut berkontribusi dan berkomitmen dengan melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membicarakan solusi dari isu lingkungan yang timbul dari tahun ke tahun. Uni Eropa dan Amerika Serikat sendiri melakukan hubungan diplomatik untuk mengurangi emisi gas metana, karena emisi gas rumah kaca metana merupakan penyebab kedua terbesar bagi perubahan iklim setelah karbon dioksida (CO₂). Untuk mengawali langkah dalam menyelesaikan masalah global warming di bawah 20C sesuai dengan tujuan Paris Agreement, pada pertengahan bulan September 2021, diadakannya deklarasi janji bersama antara Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mengurangi emisi metana yang disebabkan oleh manusia (sedikitnya 30% pada 2030). Terkait komitmen metana tersebut, UE dan AS menargetkan 20 negara untuk ikut bergabung dalam program ini, yakni China, Rusia, India, Brazil dan Arab Saudi, Norwegia, Qatar, Inggris, New Selandia, Afrika Selatan, dan lainnya.

Uni Eropa juga kerap melakukan kerjasama dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini dilakukan melalui video conference yang diadakan pada 30 Juni 2020–2 Juli 2020 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Pejabat Uni Eropa dalam pertemuan The Third Working Group on Environment and Climate Change (WG ECC). Pertemuan ini meningkatkan kerja sama dalam melindungi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, serta memenuhi komitmen program dan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, seperti agenda 2030 (Sustainable Development Goals (SDGs)), Paris Agreement, Kyoto Protocol, dan konvensi lingkungan lainnya. Komitmen Uni Eropa untuk “Pemulihan Hijau” yang menghasilkan European Green Deal (EGD) sebagai strategi baru untuk pertumbuhan berkelanjutan, iklim yang netral, sumber daya yang efisien dan ekonomi sirkular yang menjaga dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan kekayaan alam, melindungi kesehatan masyarakat, dan membentuk lapangan kerja baru.

Hubungan Antara Diplomasi Lingkungan Uni Eropa dan Implementasi COP 26

Dalam diplomasi lingkungan yang dilakukan Uni Eropa melalui COP 26, terdapat beberapa peringatan yang sangat penting bahwa banyak negara telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi dan memotong subsidi bahan bakar fosil. Salah satu hal utamanya adalah kesadaran bahwa komitmen negara-negara termasuk Eropa, mengurangi emisi gas rumah kaca tidak cukup untuk mencegah pemanasan global. Selain itu, Eropa semakin diminta untuk menunjukkan kontribusinya dalam mengurangi penyebab dan konsekuensi perubahan iklim. Karena tanpa ini, negara-negara kecil yang merasa menjadi korban, atas nama kebaikan bersama masyarakat planet ini, maka negara harus membuat komitmen dan upaya untuk mengimplementasikan Perjanjian Iklim Glasgow (Hidriyah 2021). Adapun usaha Uni Eropa yg terlihat, antara lain, sejak akhir 1990-an, Uni Eropa sudah menyebarkan serangkaian kebijakan dan sasaran. Adapun kebijakan dan sasaran yang telah diimplementasikan negara-negara di Uni Eropa antara lain, pada 2015 UE menandatangani Perjanjian Paris dengan tujuan memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (United Nations 2015). Prosedur tata kelola baru diusulkan untuk memastikan bahwa perencanaan nasional untuk energi terbarukan dan efisiensi tenaga serta taktik UE secara keseluruhan yang dikembangkan menjadi bagian yang relevan dengan satu sama lain menurut konsep Energy Union. Salah satu negara percontohan di Uni Eropa adalah Denmark, berdasarkan penilaian SGI dan TPI 2020, Denmark dinobatkan sebagai pemimpin transisi karena dinilai berhasil merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ambisius. Dengan demikian, Denmark dipandang layak untuk kepemimpinannya dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan (Yiwandana, dkk. 2021). Dengan Kasus Denmark yang menerapkan arahan dan keputusan Uni Eropa yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk memerangi ancaman pemanasan global. Denmark telah membentuk tiga lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas

utamanya adalah merumuskan langkah- langkah, khususnya untuk menghadapi ancaman pemanasan global. Hal tersebut merupakan bukti yang dapat disajikan untuk menunjukkan komitmen Uni Eropa dilihat dari kinerja internal Uni Eropa yang berhubungan dengan implementasi COP26 di Uni Eropa.

Adapun kebijakan dan sasaran yang telah diimplementasikan negara negara di Uni Eropa antara lain, pada 2015 UE menandatangani Perjanjian Paris dengan tujuan memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (United Nations 2015). Prosedur tata kelola baru diusulkan untuk memastikan bahwa perencanaan nasional untuk energi terbarukan dan efisiensi tenaga serta taktik UE secara keseluruhan yang dikembangkan menjadi bagian yang relevan dengan satu sama lain menurut konsep Energy Union. Salah satu negara percontohan di Uni Eropa adalah Denmark, berdasarkan penilaian SGI dan TPI 2020, Denmark dinobatkan sebagai pemimpin transisi karena dinilai berhasil merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ambisius. Dengan demikian, Denmark dipandang layak untuk kepemimpinannya dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan (Yiwandana, dkk 2021). Dengan Kasus Denmark yang menerapkan arahan dan keputusan Uni Eropa yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk memerangi ancaman pemanasan global. Denmark telah membentuk tiga lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas utamanya adalah merumuskan langkah- langkah, khususnya untuk menghadapi ancaman pemanasan global. Hal tersebut merupakan bukti yang dapat disajikan untuk menunjukkan komitmen Uni Eropa dilihat dari kinerja internal Uni Eropa yang berhubungan dengan implementasi COP26 di Uni Eropa.

b. Komitmen Uni Eropa dalam Perubahan Iklim

Uni Eropa merupakan aktor yang berpengaruh dalam negosiasi tingkat global. Uni Eropa telah mengembangkan cara-cara baru untuk berbagi upaya yang diperlukan dalam mengurangi emisi antara negara-negara anggotanya, memelopori penggunaan instrumen kebijakan baru, seperti perdagangan emisi dan mempraktikkan pendekatan "leadership by example" (TNC 2021). Selain itu, Uni Eropa telah menjadi kontributor terbesar pendanaan iklim untuk membantu negara-negara berkembang (European Commission 2021; OECD 2021), sehingga ini memperkuat posisinya dalam perumusan kebijakan iklim.

Uni Eropa tidak memiliki pusat kekuasaan dalam agenda kebijakannya. Hal ini dikarenakan kepresidenan Dewan dirotasi setiap enam bulan di antara pemerintah negara anggota (European Council 2022). Dewan tersebut mengizinkan Komisi Eropa (European Commission) untuk menjaga kepentingan seluruh Eropa dengan mengusulkan undang-undang yang mengikat seluruh negara anggota. Dengan demikian, peraturan nasional yang saling bertentangan dapat dihindari. Sistem ini memberikan justifikasi bahwa Uni Eropa bertindak sebagai kesatuan yang memajukan kepentingan bersama dan bukan kepentingan suatu negara tertentu. Selain untuk menghindari perbedaan kebijakan nasional, juga untuk meningkatkan legitimasi dari integrasi Eropa yang lebih luas (Grudziński, A. and Sulich, A. 2018),

Selama Konferensi Kyoto (COP 2), Uni Eropa aktif bertindak menegosiasikan perjanjian "burden sharing" yang secara simbolis sangat signifikan. Secara internasional, Uni Eropa sedang memenuhi komitmen Kyoto-nya dan menunjukkan bagaimana mekanisme yang fleksibel dapat diterapkan. Uni Eropa juga mendesak sejumlah pihak yang diperlukan untuk meratifikasi Protokol Kyoto agar protocol tersebut mulai berlaku secara efektif. Uni Eropa bekerja untuk mengamankan ratifikasi Rusia pada tahun 2004 dengan setuju mendukung keanggotaan Rusia di WTO. Pasca-Konferensi Kyoto, kebijakan yang diajukan UE adalah Emissions Trading Scheme (ETS). Sekitar 40% dari total Gas Rumah Kaca UE yang ada dalam sistem 'biaya emisi' akan dialokasikan pada perdagangan karbon untuk memberikan insentif pada instrumen kebijakan baru (Delreux, T., & Ohler, F. 2019).

Sebagai bagian dari strategi negosiasinya di COP 15, Uni Eropa berkomitmen untuk meningkatkan target pengurangan emisi 20–30% pada tahun 2020. Sayangnya, di dalam konferensi tersebut, gagasan Uni Eropa disingkirkan oleh negara-negara yang bagian emisi globalnya jauh lebih besar dan komitmen pengurangan emisinya lebih sedikit. Hal ini membuat Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accords) dianggap mengecewakan bagi Uni Eropa. Sejak COP ini, pembuat kebijakan UE mulai beralih dari menggunakan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sebagai sarana negosiasi untuk mempromosikan pengembangan kebijakan internal (Oberthür & Groen 2017). Dalam konferensi ini, negara-negara setuju untuk mengerjakan kesepakatan baru dan komprehensif—melibatkan tindakan mitigasi oleh semua pihak, dengan mencegah kenaikan suhu rata-rata lebih dari 2°C (Cifuentes-Faura 2022). Dalam perjanjian ini, Uni Eropa menganjurkan perjanjian internasional yang mengikat, kewajiban bagi negara untuk berpartisipasi melalui kontribusi nasional yang telah ditentukan, transparansi bagi semua pihak, dan menetapkan 'pengambilan stok' 5 tahunan dan kewajiban bagi semua pihak untuk memperbaharui kontribusi pada poin kedua setiap 5 tahun (Oberthür & Groen 2017). Hal ini dapat diartikan sebagai Uni Eropa yang berkomitmen kuat untuk menjadi pihak climate-neutral pertama di dunia pada tahun 2050.

5. KESIMPULAN

Perubahan iklim dunia menjadi permasalahan yang semakin serius hingga saat ini. Uni Eropa, sebagai pilar segala penyelesaian aspek permasalahan di dunia, tentunya telah memberikan kontribusi sejak akhir 1990-an dengan menyebarkan serangkaian kebijakan dan sasaran terkait iklim yang nir-tertentu ke suatu negara ataupun regional, tetapi pula secara inovatif, mengglobalkan kebijakan tersebut. Uni Eropa telah mengembangkan cara-cara baru untuk berbagi upaya yang diperlukan dalam mengurangi emisi antara negara-negara anggotanya dan memelopori penggunaan instrumen kebijakan baru, seperti perdagangan emisi dan praktik dengan pendekatan "leadership by example". Selain itu, Uni Eropa telah menjadi kontributor terbesar pendanaan iklim untuk membantu negara-negara berkembang, sehingga ini memperkuat posisinya dalam perumusan kebijakan iklim. Selama Konferensi Kyoto (COP 2), Uni Eropa aktif bertindak menegosiasikan perjanjian "burden sharing" yang secara simbolis sangat signifikan. Pasca-Konferensi Kyoto, kebijakan yang diajukan UE adalah Emissions Trading Scheme (ETS). Sekitar 40% dari total Gas Rumah Kaca UE yang ada dalam sistem 'biaya emisi' akan dialokasikan pada perdagangan karbon untuk memberikan insentif pada instrumen kebijakan baru.

Diplomasi lingkungan hadir kembali dengan Konferensi COP 26 yang merupakan suatu konferensi yang menjadi bagian dari kerangka UNFCCC yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, pada 31 Oktober–13 November 2021. COP 26 penting untuk memperbarui dan menegaskan kembali komitmen Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk membatasi pemanasan global di bawah 2C dan menetapkan target yang lebih matang. Pada akhirnya, timbul hasil dari negosiasi COP 26 yang disebut Pakta Iklim Glasgow yang berisikan kesepakatan untuk meninjau kembali rencana pengurangan emisi, komitmen untuk membatasi penggunaan batu bara, dan komitmen pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang. Komitmen dari kinerja internal Uni Eropa dalam implementasi COP26 di Uni Eropa dapat dibuktikan ketika Denmark yang merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang dinobatkan SGI dan TPI 2020 sebagai pemimpin transisi karena dinilai berhasil merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ambisius. Dalam hal ini, Denmark menerapkan arahan dan keputusan Uni Eropa yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk memerangi ancaman pemanasan global. Selain itu, Uni Eropa juga melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membicarakan solusi dari isu lingkungan. Pada COP 26 ini, Uni Eropa telah melakukan hubungan diplomatik dengan Amerika

Serikat untuk mengurangi emisi gas metana dan menargetkan 20 negara untuk ikut bergabung dalam program ini, yakni China, Rusia, India, Brazil dan Arab Saudi, Norwegia, Qatar, Inggris, New Selandia, Afrika Selatan, dan lainnya. Uni Eropa juga kerap melakukan kerjasama dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim. Pertemuan ini meningkatkan kerja sama dalam melindungi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, serta memenuhi komitmen program dan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, seperti agenda 2030 (Sustainable Development Goals (SDGs)), Paris Agreement, Kyoto Protocol, dan konvensi lingkungan lainnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Komitmen Uni Eropa sangatlah kuat dalam mengatasi perubahan iklim dalam COP 26 dengan cara diplomasi lingkungan.

REFERENSI

Buku

- Nicolas, L., & Kallab, E. (2021). *Effective Forms of Environmental Diplomacy*. Routledge.
- Orsini, A. (2020). *Environmental Diplomacy*. In: Balzacq, T., Charillon, F., Ramel, F. (eds) *Global Diplomacy. The Sciences Po Series in International Relations and Political Economy*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_17

Prosiding Seminar dan Disertasi

- Banshchikova, I. (2021). *International environmental treaty-making. The future of the UN BBNJ Treaty*. Disertasi. Oregon State University.
- Grudziński, A., & Sulich, A. (2018). *Green European Integration*. In *Proceedings of the 4th International Conference on European Integration* (pp. 364- 371).

Artikel Jurnal

- Arora, N. K., & Mishra, I. (2021). COP26: more challenges than achievements. *Environmental Sustainability*, 4, 585-588. <https://doi.org/10.1007/s42398-021-00212-7>.
- Cifuentes-Faura, J. (2022). *European Union policies and their role in combating climate change over the years*. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 1-8. Delreux, T., & Ohler, F. 2019. *Climate policy in European Union politics*. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Jaminola, L. M. (2021). *Painting The Town Green: The Potential of Environmental Diplomacy to Strengthen ASEAN-EU Relations in the Post-Pandemic World*. *Journal of Asia and Europe Relations*.
- Khan, I., & Hou, F. (2021). *Does multilateral environmental diplomacy improve environmental quality? The case of the United States*. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(18), 23310-23322.
- Li, G., Zakari, A., & Tawiah, V. (2020). *Does environmental diplomacy reduce CO2 emissions? A panFel group means analysis*. *Science of The Total Environment*, 722, 137790.
- Maamoun, N. (2019). *The Kyoto protocol: Empirical evidence of a hidden success*. *Journal of Environmental Economics and Management*, 95, 227-256.
- Manners, I. (2002). *Normative power Europe: a contradiction in terms?*. *JCMS: Journal of common market studies*, 40(2), 235-258.
- Oberthür, S., & Groen, L. (2017). *The European Union and the Paris Agreement: leader, mediator, or bystander?*. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(1), e445.
- Tayebi, S., Moosavi, S. F., & Poorhashemi, S. A. (2017). *International interaction and global peace in light of international convergence: a strategy to achieve environmental diplomacy*. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 14(7), 1573-1582.
- Diez, T. (2021). *The EU in a changing world order: in defence of normative power 2.0*. *Marmara journal of European Studies-Kuyubasi-Kadikoy: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü*, 29(1).

Situs Resmi dan Internet

- European Council. (2022). The Presidency of the Council. European Union. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- European Commission. (2021). International Climate Finance. European Union. URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-actionclimate-change/international-climate-finance_en. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- OECD. (2021). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries: Aggregate Trends Updated with 2019 Data, Climate Finance and the USD 100 Billion Goal. OECD Publishing. Paris. <https://doi.org/10.1787/03590fb7-en>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- TNC. (2021). Europe Can Lead The Way. The Natural Conservancy. URL: <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/europe/storiesin-europe/europe-can-lead-the-way/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- Hidriyah, S. (2021). HASIL KONFERENSI TINGKAT TINGGI COP26 GLASGOW. DPR RI. URL: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IIIPUSLIT-November-2021-229.pdf. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.
- DW. (2022, 21 February). Uni Eropa Minta Aksi Iklim Ditingkatkan. Deutsche Welle. URL: <http://www.dw.com/id/uni-eropa-minta-aksi-iklimditingkatkan/a-60854260>. Diakses pada tanggal 31 October, 2022.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2020) Indonesia dan Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan timur. URL: <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/indonesia-danuni-eropa-tingkatkan-kerja-sama-bidang-lingkungan-dan-perubahaniklim/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober, 2022.
- Binus. (2022). Apa signifikansi cop26 di Glasgow Terhadap komitmen tindakan iklim global? Peneliti Indonesian youth diplomacy Berbagi Kepada Mahasiswa hi binus. International Relations BINUS University. URL: <https://ir.binus.ac.id/2022/01/26/apa-signifikansi-cop26-di-glasgowterhadap-komitmen-tindakan-iklim-global-peneliti-indonesian-youthdiplomacy-berbagi-kepada-mahasiswa-hi-binus/>. Diakses pada tanggal 31 October, 2022.
- Reuters. (2021). As Dan Uni Eropa Teruskan kesepakatan global, Pangkas Emisi metana, VOA Indonesia. VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS. URL: <http://www.voaindonesia.com/a/asdan-uni-eropa-teruskan-kesepakatan-global-pangkas-emisimetana/6225607.html>. Diakses pada tanggal 31 October, 2022.
- Timperley, J. (2021) The broken \$100-billion promise of climate finance - and how to fix it, Nature News. Nature Publishing Group. Available at: <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3> Diakses pada tanggal 11 November, 2022.
- COP26 goals. (2021). UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC - Glasgow 2021. Available at: <https://ukcop26.org/cop26-goals/> Diakses pada tanggal 10 November, 2022.
- UN News. (2021). Climate and weather related disasters surge five-fold over 50 years, but early warnings save lives - WMO report | United Nations. Available at: <https://news.un.org/en/story/2021/09/1098662> Diakses pada tanggal 11 November, 2022